

REFORMASI BIROKRASI & PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

Peningkatan pelayanan publik merupakan muara/outcome dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah namun sampai saat ini penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan dan mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau.

IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK

KABUPATEN BANYUWANGI



Adanya Komitmen Kepala Daerah yang Tinggi

Pendirian Mal Pelayanan Publik



Penyelenggaraan Festival Inovasi Banyuwangi



Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik (Gancang Aron, Smart Kampung, dll)



Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Publik (90% desa fiber optic)



KABUPATEN KUBU RAYA

Adanya Komitmen Kepala Daerah (Salam Meroket)



Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)



Banyaknya Inovasi Pelayanan Publik (Sicantik Cloud dan Simyandu)



Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Publik secara online.

BEBERAPA KENDALA UMUM



- Keterbatasan Anggaran
- Keterbatasan Sarana Prasarana
- Keterbatasan Jaringan Internet
- Keterbatasan SDM

KESIMPULAN

Faktor penting yang memengaruhi peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Kubu Raya yaitu kepemimpinan dan komitmen dari kepala daerah. Kepemimpinan dan komitmen yang tinggi dari kepala daerah dapat terus mendorong aparaturnya untuk senantiasa melakukan inovasi dalam meningkatkan dan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Hal ini sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam menerima hak pelayanan publik di daerah.